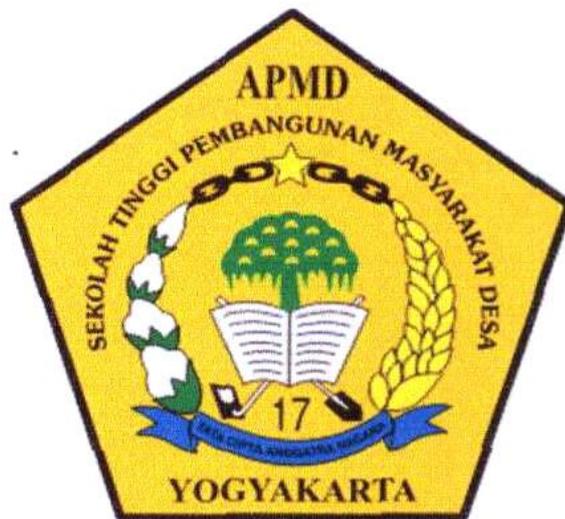


**FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM  
DI PADUKUHAN GAMPLONG I, KALURAHAN SUMBER RAHAYU,  
KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:  
AGNOS YOHANES WAGU SERAN  
NIM: 17520299**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-I  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 15 Juli 2022  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Utami Sulistiana, S.P., M.P.</u> Dosen Penguji/Pembimbing	
2. <u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA</u> Penguji I	
3. <u>Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D</u> Penguji II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnos Yohanes Wagu Seran

NIM : 17520299

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI PADUKUHAN GAMPLONG I, KALURAHAN SUMBER RAHAYU, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2022

Yang membuat pernyataan



**Agnos Yohanes Wagu Seran**

**HALAMAN MOTTO**

**“Segala Perkara Dapat Kutanggung di Dalam Dia yang  
Memberi Kekuatan Kepadaku”  
(Filipi 4:13)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada kata-kata terindah selain mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehingga saya mampu dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang berarti dalam hidup saya :

1. Untuk kedua Alm. orang tua saya tercintai dan saya banggakan “Bapak Yosep Wempi Seran terimakasih telah menjadi orang tua yang saya selalu mendukung saya dan menjadi pedoman saya semenjak saya dilahirkan di dunia ini sampai saat ini, bapak yang selalu berdoa untuk saya berhasil dan selalu mengajarkan hal yang baik agar menjadi orang yang berguna bagi kehidupan dan bersama, bapak sudah bahagia dengan para roh kudus di surga saat ini saya membalas kebaikan bapak dengan menjadi pribadi yang unik dan bisa menjadi orang sukses, dan bisa membahagiakan kaka dan adek yang bapak telah tinggalkan dan Alm Mama Sisilia Niba yang menjadi contoh saya dalam menghadapi masalah-masalah yang saya sering lakukan, terimakasih atas doa dan pujiannya selama mama hidup di dunia, mama sudah bahagia dengan para roh kudus di surga, saya selalu mendoakan mama yang telah tinggalkan kami anak-anak mama. Saat ini balasan saya dengan menyelesaikan skripsi saya agar bisa sukses dan mendapatkan pekerjaan yang bisa membahagiakan kaka-kaka dan adek-adek.
2. Untuk kaka dan adikku tersayang “kaka Vivi Seran, kaka Herman Seran, kaka Irma Seran, kaka Elis Seran, almarhum kaka Aalan seran dan adik-adik Pedro, Sisilia, Iren, Chelsio” yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku. Semoga Tuhan membukakan jalan untuk masa depan kita agar bisa menjadi kebanggaan orang tua.
3. Untuk Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. selaku Dosen Pembimbing terima kasih telah sabar memberikan bimbingan dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan hati dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. Untuk keluarga besar dari kaka Dani Drojari beserta istri dan anak-anaknya terimakasih atas masukan dan bimbingan selama saya berada di Jogja dan kaka Ernus, kaka Angki, kaka Alan, kaka Frando, adek Petu, terimakasih telah menasehati saya agar menjadi orang yang baik dalam pergaulan.
5. Untuk semua keluarga besar dari keluarga Papa dan keluarga Mama, ku ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.
6. Untuk Almamaterku tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta terimakasih sudah menjadi kampus kebanggaan saya.
7. Untuk teman-teman kelompok Praktikum “Alan Hendriquez, Feldy, Wiloz, Chanoks, Kae Alan Pangkur, Anton, Kevin” dan juga teman-teman KKN “Libert, Listy, Aldo dan Lidia” terima kasih banyak untuk kalian semua, tempat yang banyak mengajarkanku banyak hal.
8. Untuk teman-teman seperjuangan, Willy, Feldy Jeta, Trino Megah, Andy Hapan, Rian Nggunu, Alen Hormat, Leksi Boga, Hugo Ngajang, Canoks, Kevin Samador, Alan, Melita, Elvy, Karlos, Aris, Reyner, Sujas, Vahmi dan seluruh teman-teman yang tidak disebutkan satu tanpa terkecuali. Terimakasih banyak atas segala cinta dan kasih kalian. Semoga Tuhan selalu Memberkati kita semua.
9. Untuk kae-kae senior Manggarai STPMD “APMD” Yogyakarta. Kae Gusti, Kae Ernus, Kae Kris, Kae Olan, Kae Ernes, Kae Frumen, dan Kae-kae yang lain. Terimakasih telah membimbing, dan berbagi ilmu. Semoga segala kebaikan dari Kae-kae semua senantiasa Tuhan Berkati.
10. Untuk adik-adik di Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dari Manggarai terima kasih atas support dari kalian semua.
11. Untuk Ase Kae Manggarai Yogyakarta, Kae Didi Odi, Kae Gio, Kae James, Kae Ary, Kae Ugal, Quin Rabino, Apet Tuti, Aldy Tuti, Engel Seran, Kae Ren, Kae Fandi Terimakasih banyak atas kebaikan yang kalian berikan.
12. Sahabat sekaligus Ase Kae yang tidak disebutkan satu persatu tanpa terkecuali. Terima kasih atas dukungan, semangat dan doa dari kalian semua.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM di Padukuhan Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulismengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut terlibat, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Dr.Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Untuk Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan

pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Kepala Kalurahan Sumber Rahayu beserta perangkat Kalurahan dan masyarakat Gamplong I yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 2022

Penulis

Agnos Yohanes Wagu Seran

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Secara Teoritis.....	12
2. Secara Praktis .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	12
1. Paradigma Governance .....	12
2. Good Governance.....	13
3. Pengertian Fasilitasi .....	16
4. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).....	18
5. Pemerintah Desa.....	19
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Unit Analisis.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data .....	26
4. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB II. PROFIL PADUKUHAN GAMPLONG I.....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Padukuhan Gamplong I.....	32

B.	Kondisi Geografis Padukuhan Gamplong I .....	32
C.	Kondisi Demografis Padukuhan Gamplong I .....	33
D.	Visi dan Misi Padukuhan Gamplong I .....	35
E.	Gambaran Umum Dusun Gamplong I.....	37
F.	Fasilitas Desa Wisata Studio Alam Gamplong .....	39
<b>BAB III. FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN</b>		
<b>UMKM .....</b>		<b>43</b>
A.	Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan UMKM	
	Kalurahan Sumber Rahayu khususnya di Gamplong I .....	43
1.	Perencanaan Kebijakan Pengembangan UMKM Kalurahan Sumber	
	Rahayu Khususnya di Gamplong I.....	43
2.	Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan UMKM Kalurahan Sumber	
	Rahayu Khususnya di Gamplong I.....	48
B.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku UMKM Di Gamplong I	
	Kalurahan Sumber Rahayu.....	52
C.	Upaya Proteksi (Perlindungan) terhadap Keberlangsungan UMKM di	
	Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu .....	57
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>63</b>
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>66</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>		<b>71</b>

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1. Daftar Nama Informan .....	25
Tabel 2. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	33
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 4. Data Kependudukan Berdasarkan Kelompok Umur.....	35
Tabel 5. Produk Makanan Dan Minuman Gamplong I.....	40
Bagan 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Sumber Rahayu .....	36
Bagan 2. Struktur Organisasi Program Kerajinan Umkm.....	41
Bagan 3. Pengurus Pokdarwis.....	42

## INTISARI

Penelitian ini hendak diarahkan pada isu desa baru sebagai suatu entitas atau kesatuan masyarakat bukan yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat (UU desa Nomor 6 tahun 2014). Namun, kemudian isu ini kian menguat dihadapkan pada realita atau praktek negara memerlukan desa sebagai objek, sasaran atau target. Sementara di sisi lain desa juga terjebak pada dilema otoritas dan kapasitas yang lemah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal inilah yang menjadi temuan dalam penelitian yang dilaksanakan di Padukuhan Gamplong I dalam konteks peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Yang menyoal pada isu fasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di Padukuhan Gamplong I, Kalurahan Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian data-data akan dikumpulkan berbagai teknik (observasi, wawancara, studi dokumentasi) serta dianalisis sampai memungkinkan diambil kesimpulan yang objektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pengembangan UMKM dibagi dalam empat aspek. **Pertama**, Perencanaan dalam pembangunan kalurahan salah satu hal yang paling penting adalah membuat perencanaan pengembangan peraturan kalurahan harus benar-benar menetapkan sumber daya dan keuangan semaksimal mungkin sehingga tercapai tata kelola pemerintah kalurahan yang baik. **Kedua**, Pelaksanaan saat ini belum efektif dikarenakan pemerintah kalurahan belum memfasilitasi secara maksimal terhadap pelaku UMKM. **Ketiga**, Pengembangan SDM pelaku UMKM tentunya hal yang penting adalah membentuk strategi perencanaan SDM. Perekrutan pelatihan dan pengembangan, rencana karir, fase perencanaan, fase penghargaan, fase pengembangan, kompensasi, sistem hasil (*output*) dan sistem waktu. Perencanaan ini merupakan suatu bentuk pengembangan dalam SDM. **Keempat**, Upaya proteksi (perlindungan) dalam upaya perlindungan terhadap keberlangsungan UMKM sebagai landasan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tentunya berfokus pada pendekatan ekonomi yang mana saat ini pemerintah pusat dan daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal perlindungan yang meminta layanan dan pempdampingan. Maka penguatan peran Pemerintah Kalurahan mutlak dilakukan sebagai perwujudan perannya yang paling empiris dalam menyelesaikan persoalan ekonomi politik masyarakat dan memfasilitasinya mencapai target kemandirian ekonomi Padukuhan Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu.

**Kata kunci: Fasilitasi, Pemerintah Desa, Pengembangan UMKM**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan kedua asas utamanya yakni asas Rekognisi-Subsidiaritas sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*. Peran atau posisi kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.(Yunanto, 2015).

Dalam hal ini, tanpa mengabaikan percampuran (*hybrid*) definisi dan makna desa sebagai masyarakat berpemerintahan (*Self Governing Community*) dan pemerintahan lokal (*Local Self Government*), penulis hendak mengarahkan perhatian pada makna desa sebagai entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat) yang mana makna ini tercermin ke dalam empat domain dan kewenangan, seperti menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini juga mengacu pada pertimbangan konstitusional (Dalam pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan, kepala desa memiliki 4 (empat) tugas penting), historis dan sosiologis, bahwa porsi desa sebagai *Self Governing Community* jauh lebih besar dan kuat dari pada porsi desa sebagai *Local Self Government*.

Yunanto (2015) memberikan tiga makna tentang Subsidiaritas; *Pertama*, urusan atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain Subsidiaritas lokasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang masyarakat setempat kepada desa.

*Kedua*, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti atas Desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014, Subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dengan asas Desentralisasi maupun Dekonsentrasi. Asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan hak asal-usul desa, penetapan subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan sekaligus memberikan batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten atau kota.

*Ketiga*, pemerintahan tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa. Melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU Nomor 6 tahun 2014, yakni memperkuat desa untuk kesejahteraan bersama.

Pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan dorongan, motivasi dan hal yang lainnya dan dapat menguatkan potensi masyarakat, sehingga mereka lebih kreatif dan inovatif, serta kesejahteraannya terjamin. Pemberdayaan selalu terhubung dengan pribadi individu atau kelompok, hanya saja terkadang mereka tidak mengetahui apa saja potensinya. Keberadaan pilar-pilar eksternal untuk memberikan dukungan jelas dibutuhkan. Misalnya pada satu kelompok masyarakat daerah dibutuhkan peran pemerintah untuk menggali potensi. Selain itu juga dibutuhkan kelompok-kelompok lain yang lebih kuat untuk bisa memfasilitasi. Keseluruhan elemen tersebut harus menjadi satu dan berjalan beriringan, sehingga konsep dan prinsip pemberdayaan dapat dilakukan secara optimal.(Permatasari, 2021)

Pemberdayaan desa yaitu spirit yang disampaikan dalam memuliakan desa, pemberdayaan desa juga tidak terlepas dari, asas rekognisi, subsidiaritas dan distribusi. Menurut Yunanto (2021), Adapun dua jalur pemberdayaan desa, *Pertama*, jalur yang minimalis atau teknis, yang sudah berjalan dan jalurnya mulai didistribusi dana desa, kemudian distribusi dana desa itu dibuat menjadi proyek lalu ada intervensi, teknikalisisasi, dan birokrasi. Jadi ini ditemukan antara populisme yang berorientasi pada distribusi, kemudian dengan teknokrasi supaya uang itu selamat dan menghasilkan output, sebenarnya bukan untuk kepentingan desa, kepentingan sebenarnya yang memiliki proyek atas dana desa, yang sudah terjadi. hal ini tidak sesuai dengan prinsip Desa kuat, mandiri, dan demokratis, artinya distribusi menjadi alasan

untuk kordinasi baik melalui jalur birokrasi maupun teknokrasi, dengan melalui aturan yang banyak.

*Kedua*, rekognisi, subsidiaritas, Otoritasi, proteksi distribusi ini nanti diikuti dengan edukasi yang akan menghasilkan emansipasi, karena ujung dari pemberdayaan ini adalah emansipasi. Jadi kehadiran desa itu seperti yang dibayangkan sebagai basis, subyek yang memberikan manfaat. Kemudian dana diteknokratisasi supaya tepat sasaran, dibuat juga indikator dan data, tetapi datanya selalu kacau. Dengan melalui jalur yang kedua, dimana Rekognisi, Subsidiaritas dan emansipasi. Pemerintah menetapkan tujuan dan caranya ditentukan sendiri oleh desa. Dalam (Chamber, 1987) yaitu pembangunan desa dari belakang bukan dari depan. Yunanto juga mengatakan hal yang kedua ini sebagai jalur hakekat atau jalur subtansi, bukan jalur yang teknis, prosedur atau minimalis. ini adalah jalur yang maksimalis.

Saat ini peneliti melihat bahwa ketika pemerintah desa menggunakan “desa lama” sebagai suatu usaha masyarakat untuk maju dalam hal mengembangkan potensi yang ada di desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan hal ini akan berpengaruh pada faktor politik dan berpengaruh terhadap desa lama ketika pemerintah kabupaten/kota selalu turun tangan mengenai usaha masyarakat yaitu UMKM. Namun ketika melihat dari konsep desa membangun ekonomi dari UMKM diharapkan pemerintah lebih banyak hadir, bukan hanya pada membangun infrastruktur saja pemerintah lebih banyak hadir.

Fasilitasi yang diberikan pemerintah Kalurahan Sumberrahayu kepada pelaku UMKM antara lain sebagai berikut:

- (a) Pemerintah Kalurahan Sumber Rahayu Dukuh Gamplong I memfasilitasi tempat atau aula untuk pertemuan pelaku usaha UMKM dengan instansi Pemerintah daerah terkait seperti Dinas Perindustrian dalam hal memberikan bantuan.
- (b) Pendanaan atau penyertaan modal merupakan suatu hal yang mendukung bagi keberlangsungan suatu usaha. Pada awalnya pemerintah desa mengalokasikan dana bantuan permodalan namun tidak berlangsung lama karena para pengerajin dianggap sudah mampu mengembangkan usahanya dengan mandiri tanpa mengandalkan bantuan permodalan dari pemerintah desa.
- (c) Dalam kegiatan dan pelatihan pemerintah Desa Gamplong memproduksi suatu barang atau jasa dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Pelatihan dan pendidikan yang baik akan sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berkompeten. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Sumber Rahayu Dukuh Gamplong I untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pemerintah desa mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk para pengerajin agar bisa menghasilkan inovasi baru dalam menciptakan produk yang berkualitas dan diminati pasar.

Pemerintah daerah mengatur dan memiliki kewajiban atau kewenangan atas urusan Pemerintah Daerahnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama sebangun dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, dengan desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa harus berhubungan langsung desa warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan, demi kemajuan bersama terutama dalam perkembangan UMKM masyarakat Dukuh Gamplong.

Dinas-dinas ini memberikan fasilitas yang baik serta pelatihan-pelatihan untuk kegiatan masyarakat yang menjadi pelaku usaha. Dan untuk modal itu sendiri, pemerintah daerah bermitra dengan perbankan dan koperasi sebagai lembaga simpan pinjam pelaku usaha UMKM. Saat ini media yang digunakan UMKM Dukuh Gamplong I Sumber Rahayu melalui *marketplace* seperti Shopee dan Bukalapak. Akan tetapi pelaku usaha mengalami kendala dikarenakan persoalan PPKM dan PSBB di tengah pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh sekali karena transportasi dibatasi, pengunjung dibatasi, pembatasan beraktifitas karena bahan baku utama itu sendiri berasal dari luar daerah, sehingga penghasilan pelaku UMKM merosot dan menyebabkan perekonomian menjadi melemah.

Masyarakat Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu kebanyakan juga berprofesi sebagai petani atau pekerja kantoran, dan masyarakat pelaku usaha UMKM untuk saat ini berusaha mengatasi persoalan atau hambatan yang terjadi dengan memperluas segmen pasar yang ada di luar negeri, dan memperkuat perdagangan dalam negeri sesuai dengan desain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaku usaha UMKM dituntut harus lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan suatu bisnis. Hal ini berpeluang besar pada masyarakat sekitar yang bukan pelaku usaha, dengan adanya UMKM ini membantu perekonomian masyarakat umum, dan membantu wilayah atau pembangunan infrastruktur menjadi lebih baik.

Pemerintah Kalurahan juga turut serta dalam pelayanan infrastruktur dengan bantuan pembuatan gorong-gorong dan membantu masyarakat yang

ingin membuka peluang usaha. Baik pemerintah kalurahan atau masyarakat yang pelaku usaha keduanya berperan dalam struktur pembangunan Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu karena selain memiliki UMKM desa ini juga membuka wisata tentang edukasi kerajinan wisata untuk belajar bagaimana cara mengolah dan membuat suatu kerajinan.

Adanya fasilitasi pengembangan UMKM ini dapat mengoptimalkan bagaimana fungsi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, permasalahan yang terjadi saat ini dilihat dari persoalan yang muncul ketika dikaitkan dengan asas baru kedudukan baru pada pengertiannya apakah Dukuh Gamplong I Sumberrahayu dari rekognisi dan subsidiaritas akan menjadi lebih baik, sedangkan pemerintahan desanya sendiri dalam meningkatkan UMKM hanya sekedar sebagai penengah bagi masyarakat. Hal ini pastinya akan muncul pertanyaan bagaimana dengan posisi pemerintah kalurahan ketika masyarakat Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu tidak memandang pemerintahan desa sebagai pemerintahan desa yang berdiri sebagai perwalian masyarakat, sedangkan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa.

Hal ini memberikan garis batasan yang jelas bahwa, pemerintah kalurahan berwenang secara penuh mengurus dan mengelola desa, sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak secara langsung terlibat dalam urusan desa.

Saat ini, Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu apakah dikatakan bisa memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis atau tidak. Regulasi baru desa baru, dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan yang terjadi segala sesuatu urusan mengenai UMKM pada umumnya masyarakat lebih cenderung mengandalkan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, dapat menguatkan untuk Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu dimana Fasilitasi Pengembangan Pemerintah Kalurahan itu sendiri. Saat ini banyak masyarakat Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumberahayu, dalam kegiatan UMKM di mana masyarakat lebih berperan aktif untuk mencari relasi Pemerintah kabupaten/kota untuk melancarkan UMKM. Pasti masyarakat akan menganggap Pemerintah Kalurahan tidak bisa mengaungi. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih pemerintah kabupaten/kota yang mengurus urusan UMKM masyarakat.

Hal ini masyarakat perlu difasilitasi pengembangan mengenai kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh kabupaten/kota (Yunanto, 2015). Fasilitasi yang berpengaruh dalam bidang pemerintah desa dapat mengoptimalkan masyarakat Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumberrahayu menyangkut tugas dan kewenangan. Program-program kreatif

para pelaku usaha UMKM diharapkan mendapatkan dukungan dari pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat terbatasnya logistik dan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha UMKM.

Fasilitas seperti pelatihan, distribusi bantuan masih sangat dibutuhkan, guna meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat pelaku usaha UMKM Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu. Begitupun dengan alokasi dana desa yang mana seperti yang dijelaskan oleh buku “Sutoro Eko 2015” yaitu Alokasi dana dari pemerintah masuk ke satu pintu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk membiayai perencanaan desa yang mana bertujuan membangun desa atau desa membangun. Namun yang terjadi di Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu, Modal yang digunakan para pengusaha sebagian besar berasal dari modal sendiri. Faktanya masyarakat justru secara mandiri memilih koperasi simpan pinjam sebagai solusi untuk persoalan kekurangan modal UMKM.

Dukuh Gamplong I merupakan Dusun yang menghasilkan banyak kerajinan yang berlokasi di padukuhan Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu; Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY. Dan terletak di sebelah barat kota Yogyakarta, Tepatnya di Jalan Wates Km 14. Dukuh Gamplong ini menjadi pusat UMKM yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok paguyuban TEGAR (Teguh, Ekonomi, Gigih, dan Rajin).

Gamplong terkenal akan desa penghasil kerajinan tenun sejak 1950-an. Ciri khas dari pengrajin menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan

untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Bahan baku yang digunakan untuk kerajinan kegiatan UMKM di Dukuh Gamplong terdiri dari, benang, lidi, eceng gondok dan serat alam, dan diproses menjadi produk yang memiliki nilai jual seperti: kain lurik, kain tenun, tas, dompet, aksesoris wanita, gordena, tikar, stagen, kipas, pelismet dan lain-lain. Tenaga kerja yang ada pada Dukuh Gamplong berasal dari daerah yang tidak terlalu jauh dan ada beberapa masyarakat yang berhubungan keluarga, tenaga kerja tersebut sebagian besar berasal dari wilayah Dukuh Gamplong, Bantul, dan Kulon Progo.

Peneliti melihat dengan kerja keras masyarakat Dukuh Gamplong ini dimana anggaran mengenai pendapatan kegiatan UMKM yang memiliki nilai jual dipasaran yang tinggi dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat UMKM diharapkan juga turut melibatkan Pemerintah Desa dalam menciptakan usaha atau inovasi baru untuk produk yang belum ada pada Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu dimana hal ini akan berkembang ketika melihat hasil yang selama ini dibuat oleh masyarakat dengan bahan baku yang sederhana. Dan Kualitas produk tenun Dukuh Gamplong ini cukup bagus dan diminati, hal ini tergantung pada kualitas masing-masing pelaku usaha UMKM. Semakin besar rumah produksi biasanya kualitas produk yang dihasilkan lebih bagus dan laris di pasaran. Harga dari produk rumah industri tenun Gamplong relatif terjangkau, dimulai dari Rp 2.000 hingga ratusan ribu rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti lebih berfokus pada pemerintah kalurahan yang mampu hadir untuk memfasilitasi pelaku UMKM yang ada di

Dukuh Gamplong I yang bermaksud untuk “*bringing government back in*” di mana argumen atau pandangan bahwa pemerintah desa terus memainkan peranan penting dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya di tengah masyarakat desa benar-benar terwujud sekaligus untuk mengatasi resiko tata kelola (*governance*) yang selama ini hanya terbatas pada pandangan yang normatif dan tanpa basis empiris yang memadai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari Latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Sumber Rahayu Terhadap Pengembangan UMKM di Padukuhan Gamplong I, Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam memfasilitasi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya mengenai tata kelola fasilitasi pengembangan UMKM di skala lokal desa.

### **2. Secara Praktis**

Memperkaya khazanah bagi ilmu pemerintahan khususnya hubungan dengan peran pemerintah desa dalam memperkuat kegiatan UMKM di Dukuh Gamplong sebagai produk unggulan daerah.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Paradigma Governance**

Yunanto, dkk. (2021) berargumen bahwa *Governance* dibutuhkan dalam *governability* yang bersifat interaktif. Tetapi bukan *governance* dalam pengertian “*governance without government*” maupun *good governance*. Dua mantra ini bersifat normative yang hendak “melubangi pemerintah negara”, dan secara keilmuan tidak sanggup memberi daya interpretasi dan eksplanasi terhadap praktik pemerintahan. Karena itulah, Giliberto Capano, Michael Howlett dan M Ramesh menyerukan “*bringing government back in*” untuk merespons kegagalan *governance*. Mereka memiliki argument kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, dan bahwa

jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi resiko tata kelola (*governance*) ditambahkan pada pandangan yang normative atau preskriptif tanpa basis empiris yang memadai. *Governance* tetap penting dalam pengertian meta-governance yang tidak bias teknokratik-neoliberal. Tentu bukan “*governance without government*” melainkan “*government with governance*”. Pemerintah tanpa *governance*, atau interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. Sebaliknya “*governance without government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar sehingga *government making* untuk mencapai tujuan negara sulit diwujudkan.

## **2. Good Governance**

Menurut BAPPENAS dalam <http://bappenas.go.id> pemerintah paling dasar diterjemahkan sebagai kesimpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan pemerintah yang menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan pemerintah, pemerintah yang adil, demokrasi. Namun secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan *governance* memiliki arti yang lebih kompleks dibanding *government* karena menyangkut pilar-pilar *good governance* itu sendiri.

Pengertian tersebut sesuai dengan Mardiasmo (2007:17) yang menyatakan bahwa *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dan menurut UNDP *governance* merupakan orientasi pembangunan sektor publik untuk menciptakan *good governance*. Sedangkan menurut *World bank good governace* sebagai penyelenggara manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

*Good governance* merupakan sistem atau tata pemerintahan yang baik. *Good governance* juga adalah suatu penyelenggaran manajemen pembangunan yang solid, dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang ifisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara berama, sebagai suatu kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaran pemerintahan yang baik dalam suatu negara.

Menurut Dwiyanto, 2014 bahwa *good governance* dalam proses demokratisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan

lembaga pemerintahan sehingga adanya pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adapun pembagian peran yang seimbang antara tiga unsur seimbang tersebut saling berkaitan dan melengkapi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Secara umum ada tiga karakteristik dan nilai yang melekat dalam Praktik governance dalam pelayanan public diantaranya; (a) *Praktik good governance* harus memberikan ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintah sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara aktor non pemerintah seperti masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan mekanisme pasar. (b) dalam Praktik *good governance* terdapat nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan dan daya tangkap, yang membuat pemerintah lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. (C) Praktik governance adalah Praktik pemerintahan yang bersih dari KKN serta berorientasi, penegak hukum, dan akuntabilitas publik.(Dwiyanto, 2014:20-23)

Untuk mewujudkan tiga karakteristik tentunya bukan bukan pekerjaan mudah dalam praktik keseharian dalam pemerintahan di Indonesia. Karena tradisi pemerintahan yang ada saat ini masih sangat jauh dari karakteristik yang dinilai melekat dalam praktik *good governance*. Diantaranya pembagian peran antara pemerintah dan lembaga non pemerintah sering terjadi ketimpangan yang kurang profesional sehingga belum optimal, dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan

yang efisien, berkeadilan, responsife masih sangat terbatas terhadap kebutuhan masyarakat. Serta praktik KKN nilai masih terus menggurita dalam kehidupan semua lembaga pemerintah, baik yang ada di pusat, daerah dan tingkat desa.

Untuk itu dalam mengembangkan *good governance*, pemerintah perlu menggunakan strategi yang jitu. Untuk menuju pada praktik *governance* yang dapat dilakukan secara bertahap yang sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar, perubahan secara konsisten mengarah pada perwujudan ketiga karakteristik yang melekat pada *good governance*. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan praktik *good governance* dalam pelayan publik yang mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Untuk memahami *governance* lebih lanjut ada prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi tolak ukur kinerja dari suatu pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dalam pelayanan publik.(Dwiyanto, 2014)

### **3. Pengertian Fasilitasi**

Fasilitasi adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah kegiatan UMKM yang ada di Dukuh Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu.

Fasilitasi (dari kata *Facile* dan *Facilis*, Bahasa Latin) artinya mempermudah *to facilitate = to make easy*. Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu. Fasilitasi adalah tentang proses, bagaimana anda melakukan sesuatu, ketimbang isinya, apa yang anda lakukan. Panggabean (1999) menyatakan fasilitasi dan fasilitator punya dimensi yang luas sekali, fasilitasi berasal dari *facilis* (Prancis) yang berarti “memudahkan”, sehingga fasilitasi adalah aktor yang mempunyai peran memudahkan.

Menurut Sumpeno (2009) fasilitasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam memberdayakan masyarakat. Istilah fasilitasi banyak digunakan di kalangan praktisi dan aktivis pembangunan masyarakat untuk menyatakan suatu bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan masyarakat. Dengan ungkapan lain, fasilitasi menjadi bagian penting dalam suatu kegiatan, program atau organisasi untuk mempermudah proses belajar. Dalam konteks pembangunan istilah fasilitasi dapat dikaitkan dengan pola pendampingan, pendukung atau bantuan bagi masyarakat. “Pengertian Fasilitasi” secara harafiah merujuk pada “upaya memberikan kemudahan”, kepada siapa saja agar mampu mengarahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan

memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis, penyadar agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah.

Menurut Mochran (2014), fasilitasi merupakan proses pembantu peserta untuk belajar dengan cara terbaik yang memungkinkan dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan individu dan kelompok untuk mencapai atau meningkatkan pemahaman yang lebih baik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitasi adalah suatu bentuk aktifitas atau tindakan oleh suatu organisasi pemerintah maupun organisasi lainya untuk membimbing dan membina kelompok atau individu dalam bentuk pengembangan menuju kemandirian dan inovasi.

#### **4. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh PBB

dalam (Luz. A. Einsiedel, 1968, h. 9), bahwa: pembangunan masyarakat, merupakan suatu “proses” dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.(Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1289-1290).

## **5. Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 33 Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan juga perangkat Desa. Perangkat Desa yaitu terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan, Unsur kewilayahan dan juga perangkat desa yang lainnya yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi sosial

budaya masyarakat, dan posisi sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat. Menurut Widjaja (2003:27 dalam Nurjannah, 2019) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan serta pertanggungjawaban kepada Bumdes, serta memberikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada masyarakatnya. (Minahasa, n.d.) “Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa yang berkewarganegaraan Republik Indonesia yang syarat dan tata cara pemilihan selanjutnya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa disebutkan pemeritah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan

legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.(Widjaja, dalam Nurjannah, 2019) Unsur atau bagian dari pemerintah desa yaitu Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri dari pelaksanaan teknis perangkat desa dan Sekretaris Desa sebagai pelaksana kewilayahan dan juga bekerja sama bersama BPD untuk melaksanakan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas berserta kewajibannya Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati ataupun Walikota dan juga menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di batas akhir masa jabatannya kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD di setiap akhir tahun anggaran serta memberikan atau menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa pada setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat pula diambil kesimpulan bahwasannya Kepala Desa mempunyai peran penting di dalam meningkatkan pembangunan untuk kehidupan rakyat di desanya. Sebagai pimpinan utama dan tertinggi diberikan kuasa selaku penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan Perangkat Desa sendiri terdiri dari, pelaksana kewilayahan, sekretaris desa dan juga pelaksanaan teknis perangkat desa yang juga bertugas dalam membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Dari latar belakang masalah dan kerangka konseptual di atas, maka ruang lingkup penelitian adalah:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan UMKM di Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku UMKM Di Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu.
3. Upaya Proteksi (Perlindungan) Terhadap Keberlangsungan UMKM Di Gamplong I Kalurahan Sumber Rahayu.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Padukuhan Gamplong I, Kalurahan Sumber Rahayu, Kapenewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang digunakan secara menyeluruh untuk dapat menghasilkan penelitian yang tepat, sehingga hasil suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan eksploratif. Penelitian ini melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup yang penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi *goal* dalam penelitian dan jangkauan konseptual yang lebih luas. (Yusuf, 2017).

Eksplorasi adalah sebuah kegiatan teknis ilmiah untuk mencari tahu suatu area, daerah, keadaan, ruang yang sebelumnya tidak diketahui keberadaan akan isinya. Eksplorasi yang ilmiah akan memberikan sumbangan terhadap khazanah ilmu pengetahuan. Eksplorasi tidak hanya dilakukan disuatu daerah, dapat pula dikedalaman laut yang belum pernah dijajah, ruangan angkasa, bukan wawasan alam pikiran (*exploration of the mind*).

## **2. Unit Analisis**

### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti, yaitu Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Padukuhan Gamplong I, Kalurahan Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu berwenang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan UMKM yang meliputi pengawasan, mengayomi, pendampingan dan memberikan pelatihan inovasi atau kreativitas kepada masyarakat.
- 2) Padukuhan Gamplong dalam pertimbangan bahwa Padukuhan Gamplong merupakan salah satu kalurahan yang mampu menghasilkan kerajinan unggulan atau produk yang memiliki ciri khas menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).
- 3) Mendapat perijinan dari pihak-pihak terkait guna melakukan penelitian di daerah-daerah tersebut.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan keseluruhan entitas yang didalamnya mengandung atau melekat pada objek penelitian, entah itu manusia maupun institusi terkait. Subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah Pihak Pemerintah Desa, BPD, KAUR Kesejahteraan, Ketua Paguyuban Gamplong I, Masyarakat.

c. Informan

Informan yang menjadi sasaran dari penelitian ini ditentukan secara purposive. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *Purposive* yaitu teknik penentuan informan secara subjektif dengan pertimbangan bahwa informan yang dilibatkan dalam penelitian ini memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti yang dilakukan. Dalam penelitian eksplorasi seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan kriteria untuk subjek penelitiannya.

Dalam penelitian ini informan meliputi: Pemerintah Desa, BPD, KAUR Kehejahtraan, Ketua Paguyuban Gamplong I, Masyarakat Dukuh Gamplong I itu sendiri.

**Tabel 1.**  
**Daftar Nama Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	Sigit Tri Susanto	L	37	S	Kepala Desa
2	Dimas Satrio	L	28	S1	Kasi Pelayanan dan kesejahteraan
3	Waludin	L	48	SLTA	Bapak RT
4	Mariani	P	39	SLTA	Wirausaha
5	Dani Dwikurnianto	L	25	SMK	BPD
6	M. Dohri Amrizal	L	27	S1	Ketua Paguyuban
7	Giyono	L	48	SLTA	Wirausaha
8	Haryanto	L	46	SLTA	Wirausaha

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Padukuhan Gamplong I, Kalurahan Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik. Di antaranya:

a. Observasi

Data dalam penelitian ini yang dikumpulkan peneliti adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara. Sehingga data yang didapat oleh peneliti berupa data mentah.

Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Adapun data sekunder:

- 1) Buku Kalurahan wisata kerajinan Gamplong
- 2) Jurnal
- 3) Website Kalurahan Sumber Rahayu

Dalam melakukan observasi peneliti melakukan observasi secara langsung dimana peneliti melihat objek untuk diselidikinya. Dalam proses pemerolehan data informasi peneliti mendapatkannya dari tangan pertama maupun secara tidak langsung, semua proses ini

pertamanya dilakukan dengan pengamatan dan dalam proses observasi berjalan dengan lancar.

Dalam menjalankan observasi peneliti melakukan dua kali observasi sebelum mewawancarai narasumber.

Menurut Sofar dkk (2013: 153) observasi adalah kegiatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek penelitian yang dengan menggunakan seluruh indera. Dalam kegiatan ini, dilakukan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak atau dirasakan indera mengenai gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang akan diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Adapun lima proses yang dilakukan oleh peneliti:

- 1) Diawali dengan pengenalan identitas peneliti
- 2) Pewawancara sejajar dengan narasumber
- 3) Menulis identitas narasumber
- 4) Mengeksplorasi pertanyaan peneliti lebih luas
- 5) Mempersiapkan alat rekam

Melakukan wawancara dengan 7 narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan pedoman Wawancara.

Menurut Sofar dkk (2013: 153) wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (*interviewer*) sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan oleh informan (*interviewer*).

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan fokus “Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM”

c. Studi/Dokumentasi

Peneliti dapat menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk pengumpulan data yang diperlukan. Dengan mengutip Guba dkk, (2015:86) mendefenisikan dokumen sebagai “setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti”. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya.

Metode pengumpulan data sekunder dari peneliti dilakukan dari hasil wawancara bersama para narasumber yang ditentukan. Misalnya peneliti diberi buku desa kerajinan gamplong dari Bapak Dukuh Gamplong I.

Dalam Moleong, (2005: 216-217), dokumen atau *record* digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- 1) Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong.

- 2) Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- 3) Sifatnya alamiah, sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Record relatif lebih murah dan mudah diperoleh, dan dokumen harus dicari dan ditemukan.
- 5) Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 6) Hasil pengkajian akan membuka kesempatan untuk memperluas tubuh pengetahuan tentang suatu yang diselidiki.
- 7) Jadi dengan demikian, metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi sangat mutlak dalam melakukan penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup yang penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi *goal* dalam penelitian dan jangkauan konseptual yang lebih luas. (Yusuf, 2017)

Untuk mendapatkan analisis data yang tepat, maka dalam penelitian inipun menggunakan beberapa tahapan dalam menganalisis sebagai teknik analisis. Adapun komponen dalam tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Ditahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara menghimpun beragam data dari berbagai sumber, data yang dikumpulkan adalah data yang dianggap penting dan relevan untuk mendukung penelitian.

b. Identifikasi Data

Setelah data dihimpun dalam proses pengumpulan data, data kemudian diidentifikasi. Identifikasi yang dilakukan adalah guna memilih mana yang dianggap perlu jika data dianggap perlu maka data tersebut digunakan dalam penelitian dengan melakukan identifikasi data peneliti dapat memahami dan menilai fenomena yang terjadi.

c. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dilakukan dengan cara “data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terisi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.(Milles dan Huberman, 1994:18)

d. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah suatu tahap dalam menganalisis penelitian dengan menggunakan penafsiran terhadap fenomena atau data yang didapatkan. Penafsiran ini dilakukan dengan mengkaitkan

antara temuan yang ada dengan teori-teori sebelumnya yang sudah ada terkait dengan penelitian.

e. Kesimpulan atau *Conclusion*

Dalam tahapan ini, peneliti melihat dan berusaha untuk menggambarkan data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sensitife. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan ditarik kesimpulannya. (Milles dan Huberman, 1994)

## **BAB II**

### **PROFIL PADUKUHAN GAMPLONG I**

#### **A. Sejarah Padukuhan Gamplong I**

Padukuhan Gamplong I adalah Kalurahan Sumber Rahayu yang memiliki beragam potensi diantaranya kerajinan, alam, dan budayanya. Kerajinan di Kalurahan Sumberrahayu Dukuh Gamplong I ini muncul akibat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang mendorong masyarakat sekitar untuk memanfaatkan potensi hasil alam yang ada. Hal inilah yang mendorong terbentuknya desa wisata di Kalurahan Sumber Rahayu Dukuh Gamplong I. Selain memiliki kerajinan juga memiliki budaya dan keindahan yang masih terjaga.

#### **B. Kondisi Geografis Padukuhan Gamplong I**

Dukuh wisata Gamplong adalah Kalurahan yang terdiri dari 5 wilayah Padukuhan Gamplong I, Gamplong 2, Gamplong 3, Gamplong 4, dan Gamplong 5 yang terletak di :

Kalurahan : Sumber Rahayu

Kecamatan : Moyudan

Kabupaten : Sleman

Provinsi : D.I.Yogyakarta

Dengan jumlah penduduk 6.676 orang.

### C. Kondisi Demografis Padukuhan Gamplong I

**Tabel 2.**  
**Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jumlah penduduk	Jumlah (Orang)
1	Belum bekerja	1475
2	Petani	516
3	Wiraswasta	308
4	Buruh harian lepas	575
5	Pelajar/ mahasiswa	934
6	Karyawan	785
7	Pedagang	56
8	Pensiunan	222
9	PNS	293
10	Guru/Pengajar	144
11	Pengurus Rumah Tangga	941
12	Lain-lain	426

*Sumber: Profil Padukuhan Gamplong I Tahun 2021*

Dilihat dari Tabel 2 di atas mayoritas penduduk yang belum bekerja itu lebih banyak dan lebih berprovesi ke pengurus rumah tangga.

#### 1. Orbitasi

- a. Jarak Kalurahan Sumber Rahayu dengan Kantor Kecamatan Moyudan  
2,5 Km
- b. Jarak ke kantor Bupati Sleman 19 Km
- c. Jarak kantor Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta 14 Km

Orbitasi adalah letak suatu daerah/kalurahan dengan pusat kegiatan yang memegang peranan penting bagi arah pembangunan daerah/kalurahan itu sendiri. Jadi keadaan orbitasi dapat menggambarkan jarak dari Kalurahan Sumberrahayu ke beberapa titik strategis dapat dirincikan di bawah ini:

- a. Jarak dari Kalurahan Sumber Rahayu dengan Kantor Kecamatan  
Moyudan 2,5 Kilometer

b. Jarak tempuh kalurahan Sumber Rahayu ke Kantor Bupati Sleman 19 Kilometer

c. Jarak Kalurahan Sumber Rahayu ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 14 Kilometer

## 2. Pendidikan

**Tabel 3.**

**Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan/Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	SLTA/ Sederajat	2614
2	Tamat SD/ Sederajat	943
3	Diploma IV/Strata I	784
4	SLTP/Sederajat	722
5	Belum Tamat SD/Sederajat	668
6	Tidak/Belum Sekolah	530
7	Akademi/Diploma III/S MUDA	244
8	Diploma I/II	75
9	Strata II	45
10	Strata III	0
	<b>TOTAL</b>	<b>6611</b>

*Sumber: Profil Kalurahan Sumberrahayu Tahun 2021*

Dari data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Sumber Rahayu masih didominasi oleh SLTA Sederat dibanding yang lain, diikuti oleh taman SD Sederajat dengan jumlah yang hampir sama serta menyusul Diploma, SLTP Sederajat. Pada tabel 4. terdapat beberapa yang menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi seperti Diploma, Sarjana Dan Strata II serta membuat pekerjaan menjadi variasi. Dengan begitu banyaknya yang berpendidikan, juga dapat penduduk yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah.

#### D. Visi dan Misi Padukuhan Gamplong I

##### Visi

Terwujudnya desa wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan ramah yang penuh kenangan serta menjadi tempat belajar, penelitian dan pusat oleh-oleh cinderamata di Yogyakarta.

##### Misi

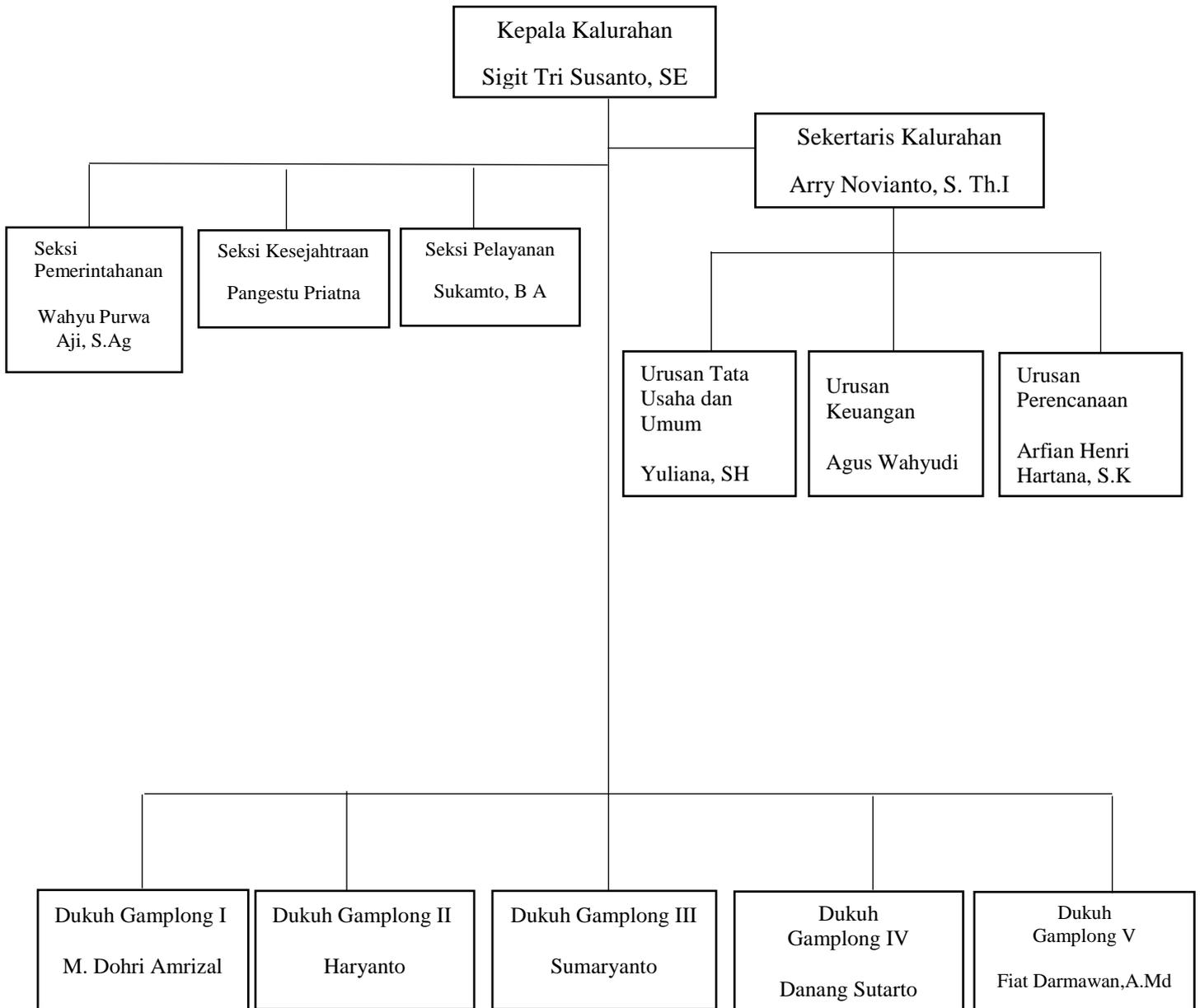
1. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun desa wisata
3. Meningkatkan pemasaran wisata, kerajinan, dan kemajuan IPTEK

**Tabel 4.**  
**Data Kependudukan berdasarkan Kelompok umur**

NO	Kelompok	Laki-laki %	Perempuan%	Jumlah
1	Dibawah 1 Tahun	55	44	99
2	2 s/d 4 Tahun	130	113	243
3	5 s/d 9 Tahun	222	198	420
4	10 s/d 14 Tahun	257	247	504
5	15 s/d 19 Tahun	226	215	441
6	20 s/d 24 Tahun	266	249	515
7	25 s/d 29 tahun	290	291	581
8	30 s/d 34 tahun	221	251	472
9	35 s/d 39 Tahun	258	259	517
10	40 s/d 44 Tahun	264	267	531
11	45 s/d 49 Tahun	284	273	557
12	50 s/d 54 Tahun	268	271	539
13	55 s/d 59 Tahun	261	249	511
14	60 s/d 64 Tahun	202	230	432
15	65 s/d 69 Tahun	162	192	354
16	70 s/d 74 Tahun	144	182	326
17	Diatas 75 Tahun	347	433	781
	Total	3303	3308	6611

Sumber: *Profil Padukuhan Gamplong I Tahun 2021*

**Bagan 1.**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sumber Rahayu**



*Sumber: Profil Kalurahan Sumber Rahayu 2021*

## **E. Gambaran Umum Dusun Gamplong I**

Kerajinan tenun Gamplong sudah ada sejak jaman penjajahan Jepang. Pada mulanya kerajinan di Gamplong hanya menghasilkan bagor, seiring berkembangnya kerajinan bertambahlah kerajinan berupa stagen, handuk, kain kasa dan sebagainya.

Kemajuan desa gamplong dalam menghasilkan kerajinan serat alam ini tidak lepas dari dampak para pengusaha yang gulung tikar karena nilai rupiah yang anjlok. Sehingga pada saat itu perkembangan kerajinan di Desa Wisata Gamplong tidak mengalami suatu kendala dalam persaingan pasar karena tidak banyak masyarakat yang berkembang saat terjadi krisis moneter.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2001 dibentuk paguyuban yang diberi nama TEGAR (tekun, ekonomis, gigih, amanah, rajin) dengan tujuan agar dapat menyatukan para pengrajin di Desa Gamplong dan agar dapat bersaing dengan para pengrajin di luar Desa Gamplong yang ketika itu mulai tumbuh para pengrajin di berbagai tempat.

Setelah dibentuk paguyuban kemajuan kerajinan di Desa Gamplong semakin merata dan terkontrol, sehingga produk yang dihasilkan semakin melimpah dan bervariasi. Oleh karena itu bapak Bupati Sleman menetapkan sebagai Desa Cinderamata. Hal ini berdampak pada bertambahnya kunjungan wisatawan ke Desa Gamplong untuk sekedar berbelanja, belajar dan melakukan penelitian. Seiring perkembangannya karena banyak wisatawan yang datang dengan tujuan wisata maka pada tahun 2004 Desa Cinderamata Gamplong berubah menjadi Desa Wisata Kerajinan Gamplong.

Pihak yang terlibat dalam program UMKM di Paguyuban TEGAR Kalurahan Sumberrahayu yaitu pengelola Paguyuban TEGAR, pemandu wisata/totur kegiatan wisata edukasi kerajinan tenun, pemilik UMKM kerajinan tenun, dan masyarakat Kalurahan wisata Gamplong. Pihak penyelenggara program berelasi Universitas Mercubuana, Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan pelatihan (*training*) serta promosi wisata Gamplong. Ada tiga jenis kegiatan yaitu pelatihan (*training*) untuk pengelola dan pelaksanaan program, kegiatan wisata edukasi, produksi serta pemasaran produk kerajinan. Program tersebut dikelola langsung oleh Paguyuban TEGAR Kalurahan Sumberrahayu yang merupakan masyarakat setempat sebagai pengelola dan pelaksanaan program.

### **1. Potensi Desa Wisata Gamplong**

Desa Wisata Gamplong merupakan desa wisata yang berlatar belakang kerajinan yang menghasilkan barang-barang kerajinan tangan seperti tas, souvenir, stagen, serbet, lopper, plesmate, aneka box, keray, dan lain-lain. Bagi wisata yang ingin belajar bagaimana cara membuat tenunan akan dibentuk oleh oleh penduduk sekitar. selain itu, para wisatawan yang ingin menginap di salah satu rumah Kalurahan sumberrahyu untuk menikmati indahnya hari liburan di Kalurahan Sumber Rahayu. Dan adapun paket wisata di Dukuh Gamplong Kalurahan Sumber Rahayu yaitu belajar membuat kerajinan seperti: membuat figura, dompet, tas, dan dusgrib. Di Kalurahan Sumber Rahayu dukuh Gamplong

I ini juga dekat dengan wisata Studio Alam Gamplong yang sangat menarik yaitu Bangunan ikonik berupa Keraton Mataram, kampung kecil ala masyarakat Mataram, rumah Jawa kuno dengan anyaman bambu, sampai kampung Belanda dan replika kali Ciliwung ada di studio ini. Dengan beberapa bangunan dalam studio tersebut, kini Desa Wisata Gamplong seperti memiliki perkotaan sendiri.

## **F. Fasilitas Desa Wisata Studio Alam Gamplong**

### *1. Home Stay*

Salah satu fasilitas yang terdapat di Desa Wisata Gamplong adalah home stay. Tersedia sekitar 225 kamar yang disewakan bagi para wisatawan yang ingin menginap. Ada 3 kategori kelas kamar yang tersedia yaitu:

- a. Jumlah 10 kamar dengan fasilitas kipas angin, tempat tidur, dan televisi.
- b. Jumlah 175 kamar dengan ketentuan harus mengkonfirmasi terlebih dahulu maksimal 2 hari sebelum datang dan menempati kamar.
- c. Jumlah 35 kamar, Kamar ini luas dan bisa digunakan untuk beberapa orang.

### *2. Kereta Mini*

Kendaraan ini merupakan sebuah alat transportasi yang digunakan untuk menjemput wisatawan dari tempat parkir bus untuk selanjutnya berjalan mengelilingi Desa Gamplong.

### 3. Pemandu Wisata

Terdapat sekitar 20 orang para pemandu wisata yang siap memandu para wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Gamplong. Mereka sebelumnya telah mendapatkan pelatihan guide dari dinas pariwisata.

### 4. Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang tersedia di Desa Wisata Gamplong yaitu makanan dan minuman lokal khas daerah setempat yang berasal dari hasil kebun wilayah Desa Gamplong.

Ada beberapa makanan dan minuman yang tersedia antara lain:

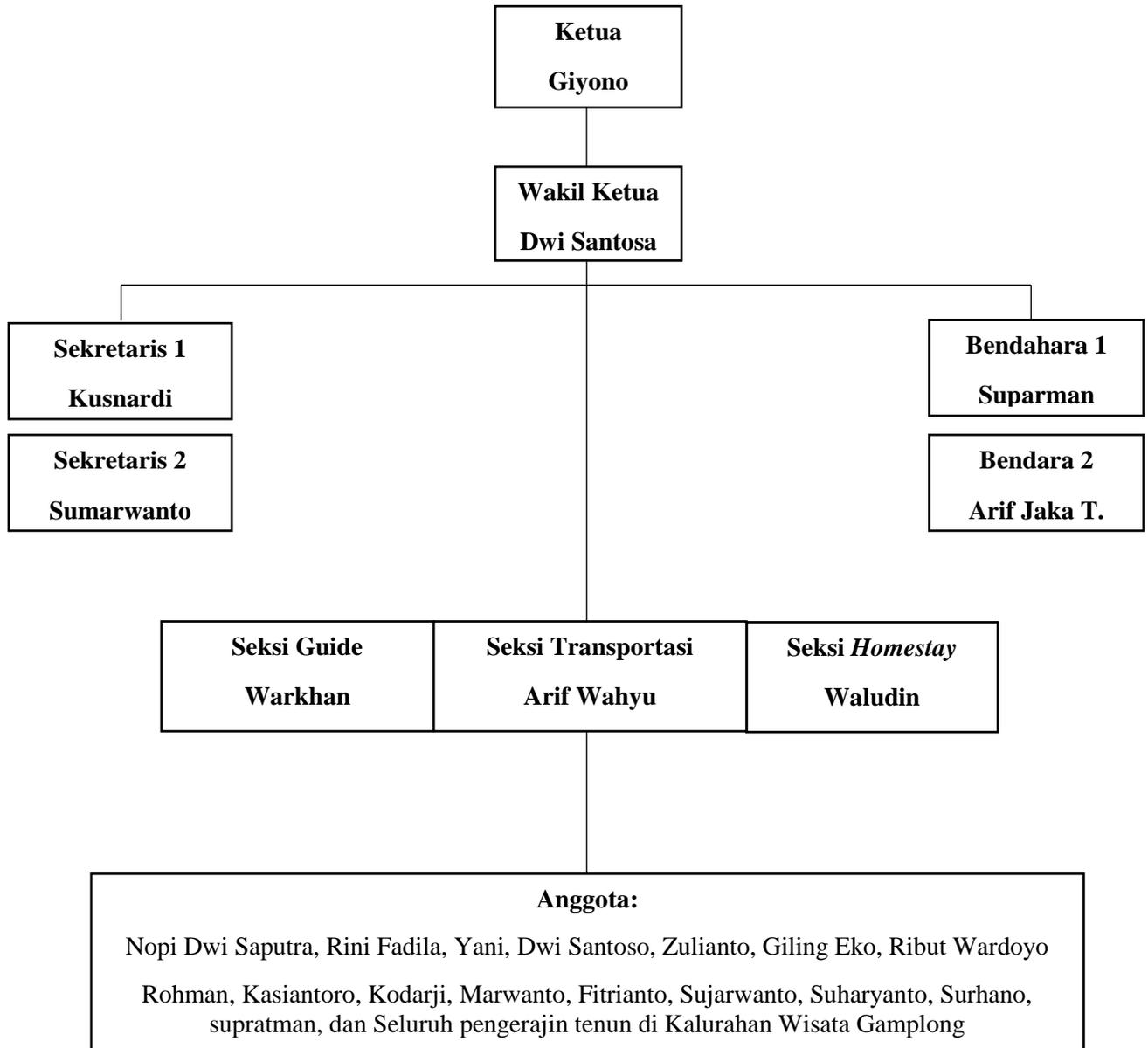
**Tabel 5.**

**Produk Makanan dan Minuman Gamplong I**

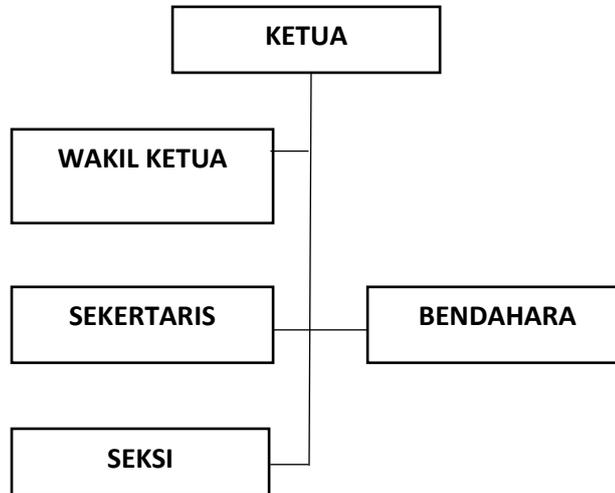
No	PRODUK	KETERANGAN
1.	Gethuk	Makanan ringan yang terbuat dari singkong atau ketela.
2.	Sengek Tempe	Terbuat dari kedele.
3.	Sayur Bobor Kelor	Sayuran kelor yang di buat dengan santan.
4.	Terancam	Biasanya berisi kacang panjang atau toge.
5.	Sambal Jenggot	Bahannya kelapa parut, tempe semangit dan rempah cabe lainnya.
6.	Klepon	Jajanan pasar yang berbentuk bulat kecil, berwarna hijau, kenyal, manis, berisi gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa.
7.	Sawut	Terbuat dari singkong dan gula merah
8.	Combro	Merupakan gorengan khas sunda yang terbuat dari parutan singkong berbentuk bolat atau lonjong di isi dengan sambal oncom
9.	Wedang Jahe	Teh sama jahe.
10.	Wedang Sekang	Minuman herbal dari serutan kayu
11.	Wedah Uwuh	Minuman yang berbahan dedaunan mirip dengan rempah

Sumber: *Kelompok Paguyuban TEGAR Desa Wisata Gamplong I 2021*

**Bagan 2.**  
**STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM KERAJINAN UMKM**



**Bagan 3.  
PENGURUS POKDARWIS**



Sumber: *Kelompok Paguyuban TEGAR Desa Wisata Gamplong 2021*

Keterangan:

1. Ketua (Suharyanto)  
Wakil (Arif Jaka Trianta)
2. Sekertaris (Arif Wahyudi)  
Wakil (Fitrianto)
3. Bendahara (Waludin)  
Wakil (Zarowi)
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban (Suharno)  
Seksi Kebersihan dan Kesejukan (Giyono)  
Seksi Keindahan dan Keramahan (Anang)  
Seksi Kenangan (Suparman)

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus, 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University press. Yogyakarta.
- Iman Amanda Permatasari 2021. Cara Pandang Empowerment Dalam Program Padat Karya Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.
- Miles, Mathew B dan Huberman, A Michael (2009). *Analisis Data Kualitatif* (buku sumber tentang metode-Metode Baru). Jakarta: UI Press.
- Minahasa, M. K. (n.d.). *Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan*.
- Moleong, L, J,. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Nurjannah, Nila Sari (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Memperkuat Home Industri Kerajinan Di Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Sleman, Yogyakarta Tahun 2019. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rusadi, Udi.2010. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sofar Silaen dan Widiyono (2013). *Metode Penelitian Sosial untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta: in Media.
- Sumpeno, Wahyudi, (2009). *Menjadi Fasilitator Genius*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Yunanto. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU desa*. Jakarta: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Yunanto. 2021. *Pemberdayaan Desa*.
- Yusuf, A Muri (2014). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Prenada media.

### Website

<https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.pdf>